

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

## 4.000 Guru Honorer Direkomendasikan Dapat Dapodik

**JAKARTA (Poskota)** - Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono menegaskan 4.000 guru honorer di Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal itu disampaikan Heru saat menghadiri acara silaturahmi bersama Kepala Sekolah se-DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7).

"Kami menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik," kata Heru kepada wartawan. Ia mengingatkan, jumlah

4.000 guru honorer tersebut tidak bisa bertambah lagi karena pendataan sudah selesai dilakukan pada Desember 2023. Angka tersebut sudah termasuk di dalamnya 107 guru yang terkena penataan.

Oleh karena itu, kepala sekolah tidak boleh merekrut guru honorer baru tanpa seizin Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.

"Namun, data itu harus ada cut off date-nya. Tadi kami sepakat dengan kepala sekolah, bahwa cut off date-nya pada Desember 2023. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan

haknya, yaitu rekomendasi Dapodik," ucap Heru.

Heru menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya untuk memperhatikan nasib guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta.

Selain merekomendasikan Dapodik kepada 4.000 guru honorer, Pj. Gubernur Heru mengatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024 mendatang.

Mantan Walikota Jakarta Utara itu mengajak para guru honorer untuk mendaftarkan diri agar dapat diproses sesuai aturan dan mekanisme yang ada. "Pada 2025 nanti, Pemprov DKI akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri," ucap Heru.

"Jika nanti anggarannya memungkinkan, jumlahnya akan bertambah lagi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memenuhi kebutuhan untuk kekurangan guru di sekolah khusus atau difabel," sambungnya. **(Pandi/den)**